



## Analisis Tingkat Literasi Keuangan dan Perpajakan Pengelola UMKM di Kota Makassar

**Nur Afiah<sup>1</sup>, Nur Eny P<sup>2</sup>**

Universitas Negeri Makassar

Email: nurafiah@unm.ac.id

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat literasi keuangan dan perpajakan bagi pelaku UMKM di Kota Makassar. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 responden pemilik UMKM yang ada di Makassar. Metode penetapan sampel yang digunakan adalah convenience sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan kemudahan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner untuk memperoleh data yang diperlukan dan melakukan wawancara terkait variabel penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Data hasil jawaban dari pertanyaan melalui wawancara dan pengisian kuesioner kemudian dilakukan analisis. Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa UMKM yang ada di Kota Makassar memiliki tingkat literasi keuangan dan perpajakan pada kategori rendah.

**Kata Kunci:** UMKM, Literasi Keuangan, Literasi Perpajakan

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang Penelitian

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak roda perekonomian di Indonesia. Selain sebagai salah satu alternatif lapangan kerja baru, juga berperan dalam laju pertumbuhan ekonomi. Menurut Undang-Undang No. 20/2008, UMKM dijelaskan sebagai perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.

Jumlah UMKM di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah UMKM mencapai 64 juta. Angka tersebut mencapai 99,9 persen dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia. (www.liputan6.com, Sept 2020). Kementerian Koperasi dan UKM RI juga melaporkan bahwa secara jumlah unit, UMKM memiliki pangsa sekitar 99,99% (64,2 juta unit) dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia (2018), sementara usaha besar hanya sebanyak 0,01% atau sekitar 5.550 unit.

Jumlah UMKM di Kota Makassar sebelumnya senantiasa mencatatkan pertumbuhan cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Merujuk pada data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar tahun 2019, terdapat 13.277 UMKM yang terdiri dari usaha rumah tangga sebanyak 5.311, usaha mikro sebanyak 4.647 serta usaha menengah sebanyak 3.319. Banyaknya jumlah UMKM tersebut tentunya dapat membantu peningkatan perekonomian di Makassar. Namun berdasarkan data terakhir dalam masa pandemi, ternyata banyak UMKM yang sudah tidak beroperasi lagi. Data UMKM yang diperoleh per tahun 2021 ternyata hanya 715 UMKM yang masih aktif beroperasi di 15 Kecamatan yang ada di Kota Makassar.

Dimasa pandemi seperti saat ini, tentunya memiliki dampak pada pemilik UMKM. Salah satu masalah yang mereka hadapi adalah kesulitan keuangan karena roda perekonomian tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat disebabkan oleh kesalahan pengelolaan keuangan, pengelolaan kredit, perencanaan keuangan yang kurang baik serta pengetahuan (literasi) tentang pengelolaan keuangan yang belum maksimal.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2019, bahwa bahwa tingkat literasi keuangan di Indonesia masih rendah yaitu hanya 38,03% (bisnis.com, Agustus 2020). Terkait literasi keuangan UMKM, telah banyak dilakukan penelitian. Triwijayanti (2017) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung memiliki tingkat pengetahuan kategori sedang terhadap pengelolaan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Akmal dan Saputra (2016) menyatakan bahwa tingkat literasi keuangan masih berada pada kategori sedang.

Selain faktor literasi keuangan, UMKM juga membutuhkan literasi perpajakan dalam mengelola usahanya, karena pajak merupakan salah satu kewajiban UMKM yang harus dilaporkan setiap tahunnya. Pada 1 Juli 2018, pemerintah telah menerbitkan kebijakan baru terkait perpajakan. Kebijakan tersebut adalah Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Ambang batas penghasilan Wajib Pajak yang dikenai PPh Final dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 tidak berubah, yakni senilai 4,8 Miliar. Batasan nilai tersebut menargetkan UMKM sebagai target pajak. Tujuannya agar pemerintah dapat merangkul sebanyak mungkin UMKM untuk terlibat dalam sistem perpajakan. Dimasa pandemi, Pemerintah melalui Kementrian keuangan juga mengeluarkan aturan terkait insentif yang dapat diperoleh bagi pemilik UMKM yaitu pembebasan pajak penghasilan (PPh) bagi UMKM yang pendapatan usahanya tidak sampai Rp. 500 juta per tahun.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (pajak.go.id), kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat Indonesia sendiri belum mencapai tingkat yang diharapkan, termasuk kesadaran dan kepatuhan pajak para pelaku UMKM. Direktorat Jenderal Pajak juga menyebutkan, jumlah Wajib Pajak (WP) UMKM yang patuh membayar pajak pada tahun 2019 tercatat sebanyak 2,31 juta WP. Jumlah tersebut tumbuh 23%

dari tahun 2018. Namun, meski tumbuh, trendnya menunjukkan pelambatan, karena lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2018, yang mencapai 27,8% atau sebanyak 1,88 juta WP.

Penelitian terkait literasi perpajakan telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian Sari (2019) mengemukakan bahwa literasi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak. Penelitian Ibda (2019) menyimpulkan bahwa penguatan literasi perpajakan bagi mahasiswa mengalami peningkatan pemahaman tentang perpajakan setelah diberi tindakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "ANALISIS TINGKAT LITERASI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN PENGELOLA UMKM DI KOTA MAKASSAR".

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui bagaimana tingkat literasi keuangan dan perpajakan pelaku UMKM di Kota Makassar.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara praktis maupun teoritis, yaitu: a) bagi pelaku UMKM diharapkan dapat memperoleh gambaran tentang perlunya memahami pengelolaan keuangan dan perpajakan usahanya melalui literasi; b) untuk ilmu akuntansi diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi berkaitan dengan literasi keuangan dan perpajakan; dan c) diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi pada bidang ilmu yang serupa bagi peneliti selanjutnya.

### **Karakteristik UMKM**

Berikut ini karakteristik usaha mikro menurut Alma (2010:157) antara lain: 1) akses sumber daya usaha mikro adalah pelaku usaha yang dikarakteristikan dengan akses mereka terhadap sumber daya yang relatif rendah, produksi skala mikro masih berorientasi pada tenaga kerja, teknologi produksi yang dimilikinya masih rendah, pengalaman pelatihan yang mereka miliki relatif minim, dan akses terhadap bahan baku yang dapat berpengaruh terhadap biaya; 2) kepemilikan usaha mikro, usaha skala mikro dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau keluarga sehingga pendapatan usaha mikro menjadi penyangga utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga; 3) peran usaha mikro, secara umum usaha mikro menyerap kurang dari 5 tenaga kerja, dan hampir seluruh usaha mikro menyerap lebih dari 1 tenaga kerja, namun bagi usaha mikro yang telah berkembang akan mampu mempekerjakan 5-10 orang; 4) kelembagaan usaha mikro, umumnya usaha mikro tidak memiliki perizinan atau lisensi formal dari lembaga yang bersangkutan, sehingga usaha mikro beroperasi secara informal; 5) kelayakan usaha guna mengetahui kelembagaan usaha skala mikro, diidentifikasi melalui aspek produksi, teknologi yang digunakan, pemasok, sifat usaha, proyeksi usaha, permintaan konsumen, produk substitusi, dan dukungan pemerintah.

Menurut Prawirokusumo (2010:48), karakteristik usaha kecil: 1) Biasanya usaha kecil dikelola oleh pemiliknya sehingga disebut owner-manager yang biasanya

bertindak sebagai pimpinan yang memberikan arahan kepada beberapa staf yang tidak terlalu banyak dan tidak berspesialisasi untuk menjalankan usaha. Mereka disebut manajemen team yang biasanya berasal dari anggota famili, sanak saudara, atau teman dekat; 2) Usaha kecil biasanya hanya mempunyai *single product line* tidak diversifikasi usaha, volume usaha relatif kecil; 3) Penanggung jawab pengambilan keputusan biasanya dipegang oleh satu orang dan kurang memberikan wewenang kepada orang lain (*very little or no delegation of authority*); 4) Hubungan antara manajemen dengan pekerjanya bersifat sangat dekat (*close management-employee relationship*); 5) Biasanya organisasi usaha tanpa adanya spesialisasi fungsional (*has few or sometimes no functional specialist, such as a full time accountant or a personal manager*); 6) Dalam sistem pelaporan juga tidak bertingkat (*has no more than two tiers of management reporting*); 7) Kurang mempunyai *long term planning*; 8) Biasanya tidak *go public*; 9) Lebih berorientasi kepada survival untuk menjaga *owner's equity dari pada profit maximisasi*; 10) Tidak dominan dalam pasar.

Adapun menurut Bustami dkk (2007:4) ciri-ciri Usaha Kecil adalah: 1) Umumnya dikelola oleh pemilik sendiri; 2) Struktur organisasi sederhana; 3) Pemilik mengenal setiap individu karyawan; 4) Persentase kegagalan sangat tinggi; 5) Kurang keahlian; dan 6) Sulitnya memperoleh modal jangka panjang.

Pasal 6 undang-undang No.20 tahun 2008 menegaskan bahwa kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut: 1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

### **Literasi Keuangan**

Salah satu bagian dari literasi baca tulis yang digalakkan oleh pemerintah melalui OJK adalah literasi keuangan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2014) literasi keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, keyakinan dan keterampilan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan baik. Semakin meningkatnya pemahaman akan literasi keuangan mengakibatkan semakin banyaknya masyarakat yang menabung dan berinvestasi sehingga semakin tinggi pula potensi transaksi keuangan yang terjadi. Hal tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan serta dapat menciptakan pemerataan pendapatan.

Menurut Strategi Nasional Keuangan Indonesia (2013:18) adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*confidence*) dan keterampilan (*skill*) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan yang lebih baik.

Definisi literasi keuangan menurut Manurung (2009:14) adalah seperangkat keterampilan dan pengetahuan yang memungkinkan seorang individu untuk

membuat keputusan dan efektif dengan semua sumber daya keuangan mereka.

Menurut Remund (2010:45), terdapat empat hal yang paling umum dalam literasi keuangan, yaitu pengetahuan dan kemampuan mengenai penganggaran, tabungan, pinjaman dan investasi.

### **Literasi Perpajakan**

Menurut Bornman and Wassermann (2018): literasi pajak adalah proses pengembangan yang dinamis terkait keterampilan dan kepercayaan diri untuk menyadari dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pajak dan konsekuensi perpajakan dari keputusan wajib pajak dan untuk menggunakan pengetahuan untuk membuat pilihan berdasarkan informasi dan keputusan sehubungan dengan berbagai transaksi.

Febriyani dan Kusmuriyanto (2015) dalam penelitiannya menjelaskan pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seseorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

Literasi perpajakan urgen dilakukan karena selama ini para peneliti masih fokus pada literasi keuangan saja. Konsep dan praktik literasi perpajakan intinya sama seperti program edukasi sadar pajak yang telah diinisiasi Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Literasi pajak berbeda dengan literasi keuangan. Literasi pajak berorientasi pada kesadaran dan taat pajak. Sementara literasi keuangan lebih menekankan kesadaran pada manajemen keuangan dan penggunaan jasa keuangan. Namun cakupannya hampir sama karena berurusan dengan keuangan, manajemen keuangan, dan perpajakan.

Menurut Rahayu (2010) menyebutkan bahwa terdapat dua dimensi wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan, yaitu: (1) pemahaman mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan (2) pemahaman wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Data dan Teknik Pengumpulan Data**

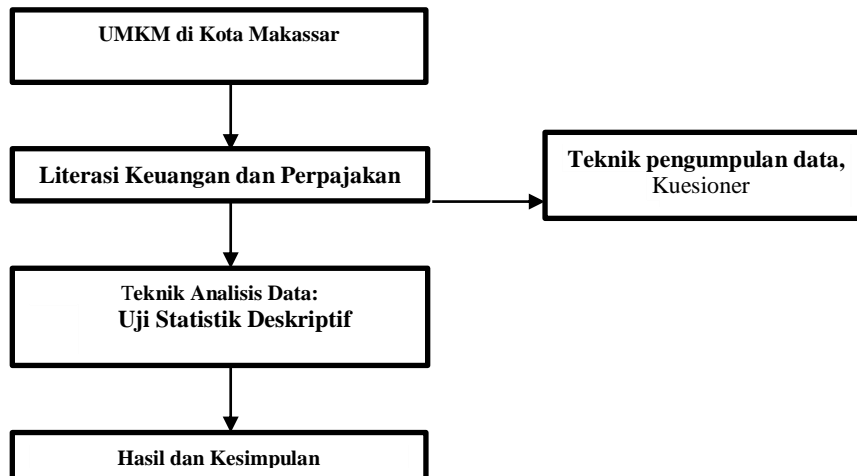
Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah tehknik *convenience sampling* dan *random sampling*. *Convenience sampling* adalah tehnik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan (Siregar, 2013). Siapa saja orang yang ditemui peneliti secara kebetulan yang sesuai dengan kriteria sampel yang merupakan pengelola UMKM di Kota Makassar. Penelitian ini juga menggunakan teknik *random sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan kepada setiap orang dalam suatu populasi yang bersedia menjadi sampel penelitian (Siregar, 2013). Alasan mengambil kedua teknik pengambilan sampel ini dikarenakan banyaknya jumlah pelaku UMKM yang

tersebar di Kota Makassar. Oleh karena itu, untuk memudahkan akses dalam mencari responden teknik *convenience sampling* dan *random sampling* ini digunakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner untuk memperoleh data yang diperlukan. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua cara, yaitu (1) riset lapangan dan (2) riset kepustakaan.

### Model Penelitian

Model penelitian disajikan sebagai berikut:



**Gambar 1. Model Penelitian**

### Definisi Operasional Variabel

Literasi keuangan adalah cara yang dilakukan untuk membantu memberikan pemahaman tentang pengelolaan keuangan agar dapat memperoleh kesejahteraan dimasa yang akan datang. Literasi keuangan dicerminkan oleh pengetahuan dan kemampuan seseorang secara kognitif mengenai keuangan. Aspek literasi keuangan mencakup 4 bagian yaitu tabungan, pinjaman, asuransi dan investasi.

Literasi pajak adalah proses pengembangan yang dinamis terkait keterampilan dan kepercayaan diri untuk menyadari dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pajak dan konsekuensi perpajakan dari keputusan wajib pajak. Indikator variabel literasi pajak dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Rahayu (2010) yang menyebutkan bahwa terdapat dua dimensi wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan, yaitu: (1) pemahaman mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP); dan (2) pemahaman wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.

## Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai tanggapan responden (pengelola UMKM) terhadap variabel yang diteliti (literasi keuangan dan perpajakan).

Untuk mengetahui pemahaman pengelola UMKM terhadap literasi keuangan dan perpajakan yaitu dengan memberi skor untuk setiap item pernyataan. Adapun skor untuk setiap jawaban dari kuesioner, dengan ketentuan: jawaban sangat setuju diberi skor 4, jawaban setuju diberi skor 3, jawaban tidak tahu diberi skor 2, jawaban sangat tidak setuju diberi skor 1.

Uji statistik deskriptif mencakup analisis data menggunakan tingkatan yang digunakan OJK yaitu *Well literate*, *Suff literate*, *Less literate* dan *Not literate*..

1. Menghitung skor tertinggi

Skor tertinggi = jumlah butir soal × skor butir tertinggi (sangat setuju)

2. Menghitung skor terendah

Skor terendah = jumlah butir soal × skor butir terendah (sangat tidak setuju)

3. Menentukan angka persentase tertinggi

$$\frac{\text{skor maksimal}}{\text{skor minimal}} \times 100\%$$

4. Menentukan angka persentase terendah

$$\frac{\text{skor minimal}}{\text{skor maksimal}} \times 100\%$$

5. Menentukan rentang = angka persentase tertinggi – angka persentase terendah

6. Menentukan interval =  $\frac{\text{rentang}}{\text{jumlah kategori}}$

$$\begin{aligned} \text{Interval} &= \text{Range (R)} : \text{Jumlah kategori} \\ &= 100 \% / 4 \\ &= 25 \% \end{aligned}$$

Untuk mengetahui tingkat kategori tersebut selanjutnya skor yang diperoleh (dalam %) dengan analisis deskriptif persentase disesuaikan dengan tabel kriteria sebagai berikut:

**Tabel 1. Kriteria Analisis Deskriptif Persentase**

Kategori	Interval Data (%)
Rendah	< 60
Sedang	60 ≤ 80
Tinggi	> 80

Sumber: Chen & Volpe (1998)

Selanjutnya, penarikan kesimpulan diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\% \text{ rata - rata} = \frac{\text{jumlah total \% skor}}{\text{butir soal}}$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melibatkan pemilik UMKM yang ada di Kota Makassar sebagai responden. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, jumlah pemilik UMKM yang terdaftar sebanyak 715 per tahun 2020. Deskripsi profil responden terdiri dari jenis kelamin, umur, pendidikan serta lamanya memiliki UMKM. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan latar belakang responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Kuesioner ini disebar secara langsung, dikirim melalui *messenger* media sosial *facebook* serta pengisian melalui *google docs* yang disebar melalui beberapa group *whatsapp* dan *telegram*. Hasil survei yang dilakukan pada responden disajikan pada Tabel 2. Dalam tabel tersebut dapat dilihat jenis kelamin, rata-rata umur responden, pendidikan dan lamanya memiliki UMKM.

**Tabel 2. Profil Responden**

Keterangan	Jumlah	Persentase
<b>Umur</b>		
a. < 20 tahun	5	5%
b. 20-30 tahun	26	26%
c. 30-40 tahun	32	32%
d. >40 tahun	37	37%
<b>Jenis Kelamin</b>		
a. Pria	41	41%
b. Wanita	59	59%
<b>Pendidikan</b>		
a. SMA / SMK	58	58%
b. D3	6	6%
c. S1	34	34%
d. S2/S3	2	2%
<b>Lama memiliki UMKM</b>		
a. < 1 tahun	31	31%
b. 1 - 5 tahun	51	51%
c. > 5 tahun	18	18%

Sumber : Data diolah, 2021

Dari tabel 2 dapat dijelaskan bahwa responden yang berumur di atas 40 tahun sebanyak 37 orang merupakan responden terbanyak, kemudian umur di atas 30 sampai 40 tahun. Hal ini dikarenakan umur antara 30 sampai 40 tahun merupakan



umur produktif untuk menjalankan usaha. Kemudian untuk kategori jenis kelamin responden wanita berjumlah lebih banyak dari pria yaitu wanita sebanyak 59 orang, dan pria sebanyak 41 orang. Hal ini disebabkan karena metode penyebaran kuesioner yang lebih banyak menggunakan group *Whatsapp* dimana mayoritas anggota pada group tersebut adalah wanita. Metode penyebaran kuesioner ini dilakukan karena penelitian dilaksanakan ditengah masa pandemi virus Corona, sehingga hal ini mempengaruhi data jenis kelamin.

Data tentang latar belakang pendidikan, responden dengan pendidikan SMA/SMK merupakan responden terbanyak yaitu 58 orang. Mengelola UMKM dianggap tidak terlalu sulit menurut hasil wawancara yang dilakukan, sehingga latar belakang pendidikan tentunya tidak akan menjadi penghambat. Untuk pertanyaan terkait lamanya memiliki UMKM, responden yang telah memiliki UMKM antara 1 sampai 5 tahun adalah yang paling banyak yaitu 51 orang, kurang dari 1 tahun sebanyak 31 orang dan lebih dari 5 tahun sebanyak 18 orang. Hal ini disebabkan karena maraknya pertumbuhan jumlah UMKM di Indonesia, khususnya di Makassar beberapa tahun terakhir, meskipun dimasa pandemi banyak yang menutup usahanya, tetapi diharapkan setelah pandemi berakhir, akan mengalami pertumbuhan kembali.

**Tabel 3. Skoring Jawaban Responden dan Persentase Butir Literasi Keuangan**

Butir	Jumlah Jawaban Responden				Skor	Persentase
	SS	S	TS	STS		
1	28	22	47	3	275	3,57
2	23	17	48	12	251	4,17
3	19	24	42	15	247	4,76
4	15	39	38	8	261	3,42
Total Skor						15,92

Sumber : Data diolah, 2021

$$\begin{aligned}
 \% \text{ Rata-Rata} &= \frac{\text{Jumlah total \% skor}}{\text{butir soal}} \\
 &= \frac{15,92\%}{4} \\
 &= 3,98 \%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan data tabel 3, untuk indikator literasi keuangan terkait penganggaran, tabungan, pinjaman dan investasi berada pada kategori rendah dengan range nilai 3,98% . Hal ini disebabkan pemilik UMKM masih ada yang kurang memahami pentingnya literasi terkait keuangan, dimana ada beberapa responden hampir tidak pernah mendapatkan informasi terkait literasi keuangan.

**Tabel 4. Skoring Jawaban Responden dan Persentase Butir Literasi Perpajakan**

Butir	Jumlah Jawaban Responden				Skor	Persentase
	SS	S	TS	STS		
1	23	32	39	6	272	2,08
2	29	17	42	12	263	1,72
Total Skor						3,80

Sumber : Data diolah, 2021

$$\begin{aligned} \% \text{ Rata-Rata} &= \frac{\text{Jumlah total \% skor}}{\text{butir soal}} \\ &= \frac{3,80\%}{2} \\ &= 1,90 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan data tabel 4, untuk indikator literasi perpajakan terkait pemahaman Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan pemahaman sanksi pajak berada pada kategori rendah dengan range nilai 1,90. Hal ini disebabkan pemilik UMKM juga masih ada yang kurang memahami pentingnya literasi terkait perpajakan., khususnya aturan-aturan yang seharusnya terkait dengan pengelolaan usaha mereka, sanksi pajak dan lingkup sosialisasi dari pihak Kantor Pajak di wilayah masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa responden, pemilik UMKM sebagian besar memang telah memiliki *handphone android*, tetapi tidak digunakan secara maksimal sebagai alat untuk mencari informasi khususnya terkait literasi keuangan dan perpajakan. Sebagian besar pengelola UMKM mendapatkan informasi seperti bantuan BLT yang diberikan oleh pemerintah, didapatkan melalui pemberitahuan dari group *whatsapp* serta dari kelompok masyarakat. Begitupun terkait informasi perpajakan, masih minim didapatkan dari kesadaran sendiri pemilik UMKM untuk mencarinya melalui literasi perpajakan. Bahkan beberapa UMKM tidak mengetahui sama sekali informasi terkait insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah. Hasil penelitian terkait literasi keuangan yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti di Indonesia, sebagian besar masih kurang yang mendapatkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat tinggi. Hal ini tentunya memberikan kesadaran bagi kita bahwa pentingnya meningkatkan literasi dimana pada saat ini sudah memasuki era digital yang dengan sangat mudah untuk mendapatkan semua informasi melalui *handphone* yang tiap hari digunakan sebagai alat komunikasi.

## KESIMPULAN

Literasi keuangan dan perpajakan pengelola UMKM di Makassar secara umum berada pada kategori rendah.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah dilakukan dimasa pandemi sehingga tidak memungkinkan seara maksimal melakukan wawancara langsung kepada semua responden, sehingga pembahasan dalam penelitian ini belum tergambarkan secara keseluruhan kondisi dari UMKM tersebut yang mendukung jawaban dari kuesioner yang diberikan.

Saran peneliti adalah diharapkan bagi pemilik UMKM sebaiknya meningkatkan literasi mereka terkait keuangan dan perpajakan untuk memaksimalkan potensi usaha yang dimiliki, serta aktif berkomunikasi kepada kantor pelayanan pajak di wilayah masing-masing untuk meningkatkan informasi terkait peraturan perpajakan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini merupakan dana hibah dari PNBPN Universitas Negeri Makassar dengan Nomor: 803/UN36.11/LP2M/2021. Peneliti juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses serta penyelesaian penelitian ini yaitu Rektor UNM, Ketua LP2M beserta tim, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar beserta jajarannya, pemilik UMKM di Makassar yang telah bersedia menjadi responden, rekan-rekan dosen di Fakultas Ekonomi UNM serta mahasiswa yang telah membantu dalam proses penyebaran kuesioner dan pengolahan data.

## REFERENSI

- Alma, & Buchari. (2010). *Kewirausahaan untuk Mahasiswa dan Umum*. Bandung: Alfabeta.
- Akmal, H. dan Saputra, Y.E. (2016). Analisis Tingkat Literasi Keuangan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1 (2) 235-244.
- Bornman, M., & Wassermann, M. (2018). Tax literacy in the digital economy. *E-Journal of Tax Research*, xx(xx), 1–16.
- Bustami, B. (2007). *Mari Membangun Usaha Mandiri*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Chen, H dan Volpe, R.P. (1998). "An Analysis of Personal Literacy Among College Students". *Financial Services Review*. Vol. 7 (2).
- Hubeis, M. (2009). *Prospek Usaha Kecil Dlam Wadah Indikator Bisnis*. Bogor: Galia Indonesia.
- Ibda, H. (2019). *Penguatan Literasi Perpajakan melalui Strategi "Gebuk" (Gerakan Membuat Kartu) NPWP pada Mahasiswa*. *Jurnal Ekonomi Pendidikan dan Kewirausahaan* Vol. 7 No. 2 Hal 83-98.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah*. Jakarta.
- Manurung Jonni J., dan Adler H. Manurung, 2009. *Ekonomi Keuangan dan Kebijakan Moneter*. Cetakan Pertama. Jakarta: Salemba Empat.



- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Revisit strategi nasional literasi keuangan indonesia (snlki)* (A. Sugiarto (ed.); Vol. 4, Issue 1, pp. 75–84). Otoritas Jasa Keuangan. <https://doi.org/10.37700/0033-2909.126.1.78>
- Prawirokusumo, S. (2010). *Kewirausahaan dan Manajemen Uaha Kecil*. Yogyakarta: BPFE.
- Remund, David L. 2010. Financial Literacy Explicated: The Case for a Clearer Definition in an Increasingly Complex Economy. *The Journal of ConsumerAffairs* Vol.44 No.2.
- Sari. (2018). *Pengaruh Literasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang Dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Moderating*. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sumitro, W. (2004). *Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Triwijayanti, Miranti. (2018). *Analisis Tingkat Literasi Keuangan pada Pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil dan Menengah.*